



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI RABU, 12 AGUSTUS 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI

Potensi Pohon Bakau yang Membentang di Sidoarjo akan Dioptimalkan

Sidoarjo, Bhirawa

Tanaman mangrove menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Pesisir pantai Utara Pulau Jawa dan Pemkab Sidoarjo menyatakan komitmennya untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir, melalui pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.

Di Balai Sidang Universitas Indonesia, Senin (10/8) kemarin, komitmen ini dideklarasikan dalam sebuah rangkaian "Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove".

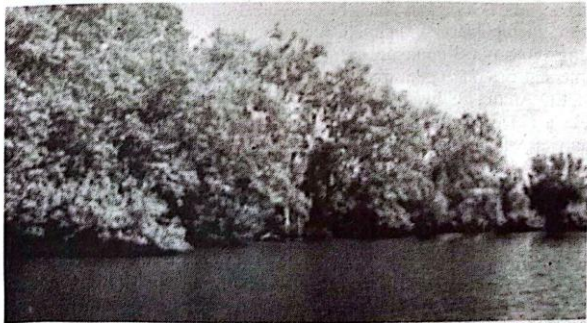
Bupati Sidoarjo, Subandi, yang hadir secara pribadi dalam acara ini mengatakan, para kepala daerah yang hadir, menegaskan kalau ekosistem mangrove tidak hanya penting sebagai benteng alami pantai, tetapi juga sebagai fondasi ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.

Di kabupaten Sidoarjo, menurut Subandi, ekosistem mangrove ini berada di sisi timur wilayah Kabupaten Sidoarjo. Membentang dari sisi utara sampai sisi selatan. Mulai dari Kecamatan Waru, Sedati, Buduran, Sidoarjo, Candi, Tanggulangin, Porong dan Jabon.

Selama ini tanaman mangrove di Sidoarjo lebih banyak dijadikan sebagai benteng alami pelindung abrasi pantai dan tambak. Namun juga mulai dimanfaatkan sebagai kawasan ekowisata bahari, juga mulai dikembangkan sebagai potensi aset ekonomi karbon bagi masyarakat sekitar.

"Meski pengolahan ekonominya oleh warga masih terbatas," komentarnya.

Dengan dideklarasikan, maka didorong agar tanaman mangrove bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan secara ekonomi dan terus berkelanjutan. Misalnya mengoptimalkan potensi silvofishery, perikanan berkelanjutan, produk olahan hasil laut dan mangrove, hasil hutan bukan kayu, ekowisata, serta UMKM lokal yang bernilai tambah dan berdaya saing. [kus.fen]



Tanaman pohon mangrove di Kabupaten Sidoarjo membentang dari wilayah Sidoarjo bagian utara sampai selatan.

Kantin SDI Ar Rahmah Ditutup sampai Hasil Laboratorium Keluar

Dinkes Periksa Sampel Air di Sekitar Sekolah

SIDOARJO - Kantin SDI Ar Rahmah di Desa Suruh, Kecamatan Sukodono, ditutup setelah puluhan siswa dan guru diduga mengalami keracunan jajanan. Penutupan dilakukan sejak Senin (10/8). Sekolah belum memastikan kapan kantin akan kembali dibuka karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan penyelidikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo.

Kepala SDI Ar Rahmah Niswatu menjelaskan, seluruh pedagang di kantin diminta menghentikan aktivitas berjualan hingga penyebab kejadian diketahui. "Kantin

kami tutup sampai nanti hasil laboratorium dan investigasi dinkes keluar," ujar Niswatu kemarin (11/8).

Selama kantin ditutup, sekolah meminta para orang tua menyiapkan bekal maupun camilan bagi anak-anak untuk dikonsumsi selama berada di sekolah. Sementara kebutuhan makan berat siswa tetap berjalan melalui program katering sekolah. "Kami buat program Makanan Bunting Bunda (MBB). Jadi wali murid kami harap bisa membawakan bekal untuk jajan yang sehat," paparnya.

Cek Kadar Kimia dan Bakteri

Terkait penyebab keracunan, Dinkes Sidoarjo menerjunkan tim sanitarian dari Puskesmas Sukodono untuk melakukan



CEK ZAT KIMIA: Tim Sanitarian Puskesmas Sukodono mengambil sampel air di rumah dekat SDI Ar Rahmah untuk cek zat kandungannya kemarin (10/8).

penyelidikan epidemiologi. Tak hanya mengambil sampel makanan, petugas juga memeriksa kondisi air di lingkungan sekolah dan mengambil sampel air dari rumah warga sekitar. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya kandungan kimia

dalam air," ujarnya. Menurut Kepala Dinkes Sidoarjo dr. Laksmi Herawati Yuwandana, pemeriksaan air dilakukan bersamaan dengan penantian hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan. Hingga kini, dinkes belum memastikan penyebab siswa dan guru muntah-muntah. Hasil pemeriksaan laboratorium diperkirakan baru dapat diketahui sekitar sepekan atau lebih.

Sebelumnya, sebanyak 23 siswa dan tiga guru SDI Ar Rahmah sempat dilarikan ke RSU Assaskin Medika setelah mengalami gejala seperti mual dan muntah. Tujuh di antaranya pernah menjalani rawat inap karena mengalami infeksi pada bagian perut. (eza/hen)

Tujuh Bulan, Damkar Tangani 116 Kebakaran

Mayoritas Api Melahap Lahan Kosong

SIDOARJO - Seiring masuknya musim kemarau, potensi kebakaran di Kota Delta cenderung meningkat. Selama Januari-Juli, Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) BPBD Sidoarjo telah menangani 116 kebakaran. Sebagian besar menyasar lahan kosong.

Tercatat, ada 46 lahan kosong yang terbakar dalam tujuh

bulan. Lokasinya banyak berada di kawasan permukiman. Selain lahan, kebakaran tahun ini juga terjadi pada sejumlah objek lain, seperti rumah, tempat usaha, industri, hingga kendaraan.

Humas Damkar BPBD Sidoarjo Yoli Wisnu menjelaskan, kondisi lahan yang mulai mengering selama musim kemarau membuat potensi kebakaran semakin besar. Api dari pembakaran mudah merambat ketika terkena hembusan angin. "Penyebabnya karena rum-

put sudah kering dan mudah terbakar," ujarnya.

Yoli mengatakan, pemilik lahan diminta rutin membersihkan rumput dan tanaman kering yang dapat menjadi bahan bakar ketika terjadi kebakaran. Terutama untuk lingkungan perumahan. Sebab kebakaran bisa memicu terjadinya musibah lebih besar.

Kebakaran lahan kosong sempat terjadi Senin (10/8). Kejadian tersebut tersebar di empat kecamatan yakni Sedati, Krian, Porong, dan Waru. (ful/hen)

KEBAKARAN TAHUN 2025-2026



Takut Pajak Naik, Pelaku Usaha Menolak Disensus

SIDOARJO - Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo masih menghadapi kendala saat melakukan pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Sejumlah warga hingga pelaku usaha enggan memberikan data ketika petugas datang ke lokasi. Padahal waktu pelaksanaan SE semakin terbatas. Pendataan akan ditutup pada 31 Agustus. Namun hingga kemarin (11/8), progres pendataan kegiatan ekonomi di Sidoarjo baru mencapai sekitar 80 persen.

Kepala BPS Sidoarjo Bagyo

Trilaksono mengatakan, penolakan warga dilatarbelakangi berbagai alasan. Salah satunya kekhawatiran jika data yang diberikan akan berkaitan dengan kewajiban pajak. "Ada yang takut kena pajak atau takut pajaknya naik. Mereka (pelaku usaha, Red) tidak mau buka pintu dan enggan didata," kata Bagyo kemarin (11/8). Menurut dia, petugas masih terus melakukan pendekatan agar warga bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan. Petugas juga memberikan pema-

haman bahwa pendataan dilakukan untuk mempermudah gambaran kondisi kegiatan ekonomi dan tidak berkaitan dengan pajak. Selain pelaku UMKM, kendala serupa juga ditemukan saat petugas menandatangani perusahaan. Sejumlah perusahaan tidak dapat langsung memberikan data karena petugas harus lebih dulu mendapatkan persetujuan dari pimpinan maupun pun kantor pusat. "Kami diminta izin dulu ke kantor pusatnya, baru diberi datanya," ujarnya. (ful/hen)



SASARAN SENSUS: Pemilik usaha di Jalan Gajah Mada turut didatangi petugas Sensus Ekonomi 2026. Banyak pengusaha menolak memberikan data karena khawatir nilai pajak akan dinaikkan.

Masuk Konten Pak Purnomo Polisi, Istri dan Dua Anak ODGJ Diperhatikan Pemkab

KOTA-Niat menjual rumah demi kesembuhan istri dan dua anaknya akhirnya tak perlu dilakukan Nuryanto, 57, warga RT 18/RW 6 Dusun Kersan, Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Beban berat keluarga tersebut mendapat perhatian Pemkab Sidoarjo setelah kisah mereka viral di media sosial.

Selama bertahun-tahun, Nuryanto harus berjuang menghadapi kondisi kesehatan mental tiga anggota keluarganya. Dua anak laki-lakinya, Sulton, 33, dan Rifa'i, 30, serta istrinya, Maria Ulfa, mengalami gangguan jiwa dan telah menjalani berbagai upaya pengobatan.



KASIHAN: Keluarga asal Wonoayu, Sidoarjo, akhirnya dijemput Dinsos di Lamongan.

Bahkan, dua anaknya telah berulang kali menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Sulton tercatat sembilan kali keluar masuk RSJ

Menur. Sementara Rifa'i dua kali menjalani perawatan di RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang, Malang. Keduanya juga

sempat menjalani perawatan di Liponsos Sidoarjo.

Namun, pengobatan yang dijalani belum membuat kondisi mereka be-

nar-benar stabil. Setelah kembali ke rumah, kondisi mereka sempat membaik sebelum akhirnya kambuh kembali.

Nuryanto mengatakan, gangguan yang dialami anak pertamanya sudah berlangsung sejak duduk di bangku SMP, sekitar 20 tahun lalu. Menurutnya, faktor keturunan, tekanan ekonomi, hingga persoalan keluarga turut memengaruhi kondisi anaknya.

"Kalau di rumah sakit jiwa belum sembuh, masih setengah-setengah lah, sudah dikembalikan ke keluarga. Tapi wajib minum obat selama lima tahun," ujar Nuryanto, Selasa (11/8).

● Ke Halaman 10

CS



Masuk Konten...

Berbagai cara telah ditempuh Nuryanto. Selain rumah sakit dan Liponsos, ia juga membawa keluarganya berobat ke sejumlah tempat pengobatan alternatif di Kabupaten Pati dan Blora, Jawa Tengah.

Kondisi keluarga semakin berat ketika istri dan anak keduanya juga mengalami gangguan kesehatan mental. Maria Ulfa disebut mengalami kondisi tersebut setelah bertahun-tahun memikirkan anak-anaknya, per-

soalan utang, dan tekanan ekonomi.

Sebelum sakit, Maria dikenal aktif bekerja dan berkegiatan. Ia pernah menjadi tim sukses, berjualan sayur keliling, hingga menjadi panitia kegiatan ziarah selama bertahun-tahun.

"Dulu istri saya banyak kegiatan. Gaul lah istilahnya. Tidak ada tanda-tanda sakit seperti ini. Karena memikirkan anaknya, utang, masalah ekonomi, dan keturunan, akhirnya drop juga," ungkap Nuryanto.

Dalam kondisi tersebut, Nuryanto yang sehari-hari bekerja sebagai sopir

dengan penghasilan tidak menentu kembali mencari jalan untuk mengobati keluarganya.

Dari media sosial, ia mengetahui adanya pondok rehabilitasi mental yang dikelola anggota Polres Lamongan sekaligus konten kreator, Ipda Purnomo atau yang dikenal sebagai Pak Purnomo.

Nuryanto kemudian membawa istri dan anak pertamanya ke tempat tersebut. Namun, ia harus mengeluarkan biaya Rp 8 juta untuk dua orang pada bulan pertama.

"Waktu itu saya punya Rp 5 juta. Kekurangannya Rp 3 juta saya pinjam ke saudara. Satu bulan persis saya lunasi," katanya.

Nuryanto sebenarnya ingin membawa anak keduanya untuk mendapatkan perawatan serupa. Namun, keterbatasan biaya membuat rencana tersebut urung dilakukan.

"Saya mampu bawa Rp 5 juta, Pak. Tapi asal tiga orang. Saya kalau di rumah khawatir anak saya keluyuran di jalan. Saya kerja jadi kepikiran. Kalau dititipkan di rumah sakit, saya bisa kerja untuk membiayai kehidupan sehari-hari," tuturnya.

Saking beratnya beban biaya pengobatan, Nuryanto bahkan sempat berpikir menjual rumah yang ditempatinya. "Saya sampai kepikiran untuk jual rumah, untuk biaya berobat. Saya rela jual rumah asal keluarga saya sembuh," ujarnya.

Kisah keluarga Nuryanto kemudian viral setelah dirinya bertemu Pak

Purnomo dan kisah tersebut diunggah melalui TikTok dan Instagram.

Video tersebut akhirnya mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah desa, kecamatan, Dinas Sosial, hingga pihak terkait kemudian berkoordinasi untuk memberikan penanganan.

Camat Wonoayu Anwar mengatakan, pemerintah desa, kecamatan, dan Puskesmas Wonoayu sebelumnya telah berupaya membantu pengobatan keluarga tersebut. Namun, kondisi keluarga terus berkembang hingga akhirnya ibu dan anak kedua juga mengalami gangguan.

"Sudah pernah dibawa ke Liponsos, sudah pernah dibawa ke Rumah Sakit Menur. Ketika dibawa ke Liponsos karena tidak mengalami penyembuhan yang signifikan, akhirnya anak ini lari," jelasnya.

Menurut Anwar, keluarga kemudian meminta bantuan agar biaya perawatan di tempat Pak Purnomo dapat ditanggung pemerintah. Saat itu, biaya untuk tiga orang mencapai sekitar Rp 5 juta per bulan setelah mendapat keringanan. (dik/vga)

ga menyampaikan kronologi kejadian se-
m ara tertulis kepada Dikbud Sidoarjo.

CS





GERAK CEPAT: Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dikbud Kabupaten Sidoarjo Dr. Netti Lastiningsih, M.Pd., (kanan) saat melihat kondisi siswa di Sukodono.

Dikbud Kembali Keluarkan SE dan Minta Sekolah Aktif Koordinasi dengan Puskesmas

■ Dugaan Keracunan Siswa SD di Sukodono

KOTA-Dugaan keracunan jajanan kantin di SD Islam (SDI) Ar Rahmah, Dusun Lengki, Desa Suruh, Kecamatan Sukodono, membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidoarjo memperketat pengawasan terhadap jajanan di lingkungan sekolah.

Dikbud Sidoarjo kembali menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang jajanan sehat di kantin sekolah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya preventif agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Tak hanya mengeluarkan SE, Dikbud juga meminta seluruh sekolah untuk aktif berkoordinasi dengan puskesmas terdekat. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mendapatkan pendampi-

ngan terkait jenis jajanan yang diperbolehkan, cara penyimpanan makanan, hingga pengelolaan kantin yang memenuhi standar kesehatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dikbud Kabupaten Sidoarjo Dr. Netti Lastiningsih, M.Pd., mengatakan, pihaknya sebenarnya telah menerbitkan SE terkait jajanan sehat sebelumnya. Namun, adanya dugaan keracunan tersebut menjadi momentum untuk kembali mengingatkan seluruh sekolah agar lebih memperhatikan keamanan pangan bagi siswa.

"Sebenarnya kami sebelumnya sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait dengan jajanan sehat di kantin sekolah. Tetapi ada kejadian ini,

● Ke Halaman 10

Dikbud Kembali Keluarkan...

kami akan mengingatkan kembali dengan membuat surat edaran,” ujar Netti, Selasa (11/8).

Menurut Netti, pengawasan jajanan sekolah tidak cukup hanya dilakukan oleh pihak sekolah. Karena itu, sekolah diminta rutin melakukan koordinasi dan mendapatkan pendampingan dari puskesmas di wilayah masing-masing.

“Dan juga kami minta kepada sekolah-sekolah untuk terus berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat di wilayahnya terkait dengan jajanan sehat yang diperbolehkan, bagaimana cara penyimpanan dan lain-lain. Itu harus melakukan koordinasi pendampingan

dari Puskesmas,” jelasnya.

Selain melalui SE, upaya pencegahan juga dilakukan dengan mendorong pertukaran praktik baik antarsekolah. Melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), sekolah didorong berbagi pengalaman mengenai pengelolaan kantin sehat.

Terutama dari sekolah-sekolah yang pernah mendapatkan penghargaan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan Tim Keamanan Pangan Nasional.

“Melalui K3S dan MKKS juga ada kegiatan berbagi praktik baik tentang kantin sehat dari sekolah yang pernah mendapat penghargaan PJAS, Tim Keamanan Nasional,” katanya.

Netti menegaskan, sekolah juga diimbau tidak berjalan sendiri dalam memastikan keamanan jajanan yang dikonsumsi para siswa. Pendampingan dari puskesmas setempat dinilai penting untuk memastikan pengelolaan makanan dan minuman di lingkungan sekolah sesuai ketentuan kesehatan.

Sementara itu, Dikbud Sidoarjo telah melakukan langkah awal terkait dugaan keracunan jajanan di SDI Ar Rahmah. Pada Sabtu (8/8), petugas Dikbud langsung melakukan investigasi dengan meminta keterangan kepada pihak yayasan dan sekolah.

Investigasi tersebut dilakukan setelah pihak sekolah sebelumnya diminta

menyampaikan kronologi kejadian secara tertulis kepada Dikbud Sidoarjo.

Tak berhenti pada investigasi, Dikbud juga mendatangi RSU Assakinah Medika Sukodono untuk menjenguk siswa yang masih menjalani perawatan. Saat kunjungan tersebut, tercatat enam siswa masih menjalani rawat inap.

Langkah tersebut menjadi bagian dari respons Dikbud Sidoarjo sekaligus upaya memastikan penanganan terhadap para siswa berjalan dengan baik. Di sisi lain, penguatan pengawasan jajanan sekolah diharapkan mampu mencegah munculnya kejadian serupa di lingkungan pendidikan Sidoarjo. **(dik/vga)**

CS





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



SASARAN SENSUS: Pemilik usaha di Jalan Gajah Mada turut didatangi petugas Sensus Ekonomi 2026. Banyak pengusaha menolak memberikan data karena khawatir nilai pajak akan dinaikkan.

Takut Pajak Naik, Pelaku Usaha Menolak Disensus

SIDOARJO – Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo masih menghadapi kendala saat melakukan pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Sejumlah warga hingga pelaku usaha enggan memberikan data ketika petugas datang ke lokasi. Padahal waktu pelaksanaan SE semakin terbatas. Pendataan akan ditutup pada 31 Agustus. Namun hingga kemarin (11/8), progres pendataan kegiatan ekonomi di Sidoarjo baru mencapai sekitar 80 persen.

Kepala BPS Sidoarjo Bagyo

Trilaksono mengatakan, penolakan warga dilatarbelakangi berbagai alasan. Salah satunya kekhawatiran jika data yang diberikan akan berkaitan dengan kewajiban pajak. “Ada yang takut kena pajak atau takut pajaknya naik. Mereka (pelaku usaha, Red) tidak mau buka pintu dan enggan didata,” kata Bagyo kemarin (11/8). Menurut dia, petugas masih terus melakukan pendekatan agar warga bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan. Petugas juga memberikan pema-

haman bahwa pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi kegiatan ekonomi dan tidak berkaitan dengan pajak. Selain pelaku UMKM, kendala serupa juga ditemukan saat petugas mendatangi perusahaan. Sejumlah perusahaan tidak dapat langsung memberikan data karena petugas harus lebih dulu mendapatkan persetujuan dari pimpinan maupun kantor pusat. “Kami diminta izin dulu ke kantor pusatnya, baru diberi data-nya,” ujarnya. **(ful/hen)**

Jawa Pos

Kantin SDI Ar Rahmah Ditutup sampai Hasil Laboratorium Keluar

Dinkes Periksa Sampel Air di Sekitar Sekolah

SIDOARJO - Kantin SDI Ar Rahmah di Desa Suruh, Kecamatan Sukodono, ditutup setelah puluhan siswa dan guru diduga mengalami keracunan jajanan. Penutupan dilakukan sejak Senin (10/8). Sekolah belum memastikan kapan kantin akan kembali dibuka karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan penyelidikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo.

Kepala SDI Ar Rahmah Niswaton menjelaskan, seluruh pedagang di kantin diminta menghentikan aktivitas berjualan hingga penyebab kejadian diketahui. "Kantin

kami tutup sampai nanti hasil laboratorium dan investigasi dinkes keluar," ujar Niswaton kemarin (11/8).

Selama kantin ditutup, sekolah meminta para orang tua menyiapkan bekal maupun camilan bagi anak-anak untuk dikonsumsi selama berada di sekolah. Sementara kebutuhan makan berat siswa tetap berjalan melalui program katering sekolah. "Kami buat program Makanan Buatan Bunda (MBB). Jadi wali murid kami harap bisa membawakan bekal untuk jajan yang sehat," paparnya.

Cek Kadar Kimia dan Bakteri

Terkait penyebab keracunan, Dinkes Sidoarjo menerjunkan tim sanitarian dari Puskesmas Sukodono untuk melakukan



CEK ZAT KIMIA: Tim Sanitarian Puskesmas Sukodono mengambil sampel air di rumah dekat SDI Ar Rahmah untuk diteliti kandungannya kemarin (11/8).

penyelidikan epidemiologi. Tak hanya mengambil sampel makanan, petugas juga memeriksa kondisi air di lingkungan sekolah dan mengambil sampel air dari rumah warga sekitar. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya kandungan kimia

maupun bakteri yang dapat menjadi sumber masalah.

Sanitarian Puskesmas Sukodono Elli mengatakan, pemeriksaan air dilakukan untuk memastikan apakah sumber air turut berpengaruh terhadap kejadian tersebut. "Kami mengecek kadar kimia dan bakteri

dalam air," ujarnya.

Menurut Kepala Dinkes Sidoarjo dr. Lakshmi Herawati Yuwantina, pemeriksaan air dilakukan bersamaan dengan penantian hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan. Hingga kini, dinkes belum memastikan penyebab siswa dan guru muntah-muntah. Hasil pemeriksaan laboratorium diperkirakan baru dapat diketahui sekitar sepekan atau lebih.

Sebelumnya, sebanyak 23 siswa dan tiga guru SDI Ar Rahmah sempat dilarikan ke RSUD Assakinah Medika setelah mengalami gejala seperti mual dan muntah. Tujuh di antaranya harus menjalani rawat inap karena mengalami infeksi pada bagian perut. (eza/hen)

Jawa Pos



IST
HUMANIS: Tim Polwan Polresta Sidoarjo saat memberi motivasi dan antisipasi bullying di kalangan sekolah.

Polwan Patroli Sekolah, Cegah Bullying dan Motivasi Pelajar

RADAR SIDOARJO- Polwan Jengjala Presisi Polresta Sidoarjo terus mengintensifkan patroli ke lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menyambangi sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam patroli tersebut, personel Polwan Jengjala Presisi tidak hanya melakukan pemantauan keamanan, tetapi juga berdialog dengan pelajar serta menyampaikan pesan kamtibmas. Iptu Susmiati dari Polwan Jengjala Presisi mengatakan, kehadiran polisi di sekolah diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus membangun kedekatan dengan para pelajar.

“Melalui patroli ini kami ingin memberikan

kepada para pelajar maupun guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kami juga memberikan edukasi agar para siswa tidak melakukan bullying maupun terjerumus dalam kenakalan pelajar,” ujar Iptu Susmiati.

Iptu Susmiati menambahkan pencegahan bullying atau perundungan membutuhkan kepedulian seluruh pihak. Para pelajar diajak untuk saling menghormati, menjaga pergaulan, serta menyelesaikan setiap persoalan dengan cara yang baik tanpa kekerasan.

“Kami mengajak adik-adik pelajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jangan melakukan perundungan terhadap teman karena setiap anak berhak merasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah,” jelasnya.

■ Ke Halaman 10

Polwan Patroli Sekolah,...

Selain edukasi tentang bullying, Polwan Jenggala Presisi juga memberikan motivasi kepada para siswa agar lebih giat belajar, menaati tata tertib sekolah, menghormati guru, serta menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja yang dapat merugikan diri sen-

diri maupun orang lain.

Kehadiran Polwan di lingkungan sekolah juga menjadi sarana membangun komunikasi yang positif antara kepolisian dengan generasi muda.

Pendekatan secara humanis diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pelajar untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban, baik di lingkungan seko-

lah maupun di luar sekolah.

“Kami berharap para pelajar semakin semangat belajar, fokus meraih cita-cita, dan tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif.

Mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tertib, dan bebas dari bullying,” tutup Iptu Susmiati. (sur)

Potensi Pohon Bakau yang Membentang di Sidoarjo akan Dioptimalkan

Sidoarjo, Bhirawa

Tanaman mangrove menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berada di Pesisir pantai Utara Pulau Jawa dan Pemkab Sidoarjo menyatakan komitmennya untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir, melalui pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.

Di Balai Sidang Universitas Indonesia, Senin (10/8) kemarin, komitmen ini dideklarasikan dalam sebuah rangkaian "Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove".

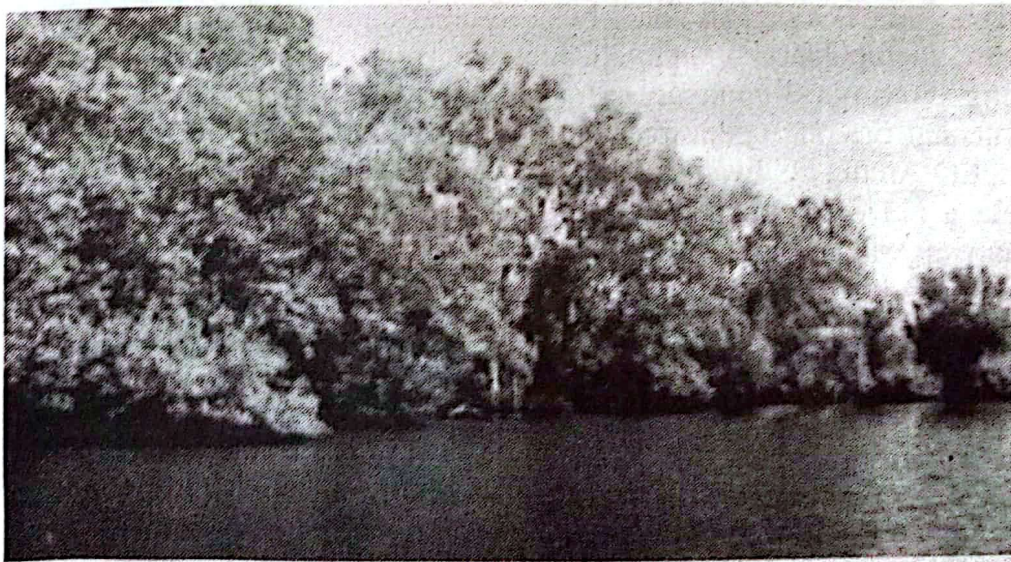
Bupati Sidoarjo, Subandi, yang hadir secara pribadi dalam acara ini mengatakan, para kepala daerah yang hadir, menegaskan kalau ekosistem mangrove tidak hanya penting sebagai benteng alami pantai, tetapi juga sebagai fondasi ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.

Di kabupaten Sidoarjo, menurut Subandi, ekosistem mangrove ini berada di sisi timur wilayah Kabupaten Sidoarjo. Membentang dari sisi utara sampai sisi selatan. Mulai dari Kecamatan Waru, Sedati, Buduran, Sidoarjo, Candi, Tanggulangin, Porong dan Jabon.

Selama ini tanaman mangrove di Sidoarjo lebih banyak dijadikan sebagai benteng alami pelindung abrasi pantai dan tambak. Namun juga mulai dimanfaatkan sebagai kawasan ekowisata bahari, juga mulai dikembangkan sebagai **potensi aset ekonomi karbon** bagi masyarakat sekitar.

"Meski pengolahan ekonominya oleh warga masih terbatas," komentarnya.

Dengan dideklarasikan, maka didorong agar tanaman mangrove bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan secara ekonomi dan terus berkelanjutan. Misalnya mengoptimalkan potensi silvofishery, perikanan berkelanjutan, produk olahan hasil laut dan mangrove, hasil hutan bukan kayu, ekowisata, serta UMKM lokal yang bernilai tambah dan berdaya saing. [kus.fen]



Tanaman pohon mangrove di Kabupaten Sidoarjo membentang dari wilayah Sidoarjo bagian utara sampai selatan.

Istimewa

CS
dipinda dengan CamScanner

Tujuh Bulan, Damkar Tangani 116 Kebakaran

Mayoritas Api Melahap Lahan Kosong

SIDOARJO - Seiring masuknya musim kemarau, potensi kebakaran di Kota Delta cenderung meningkat. Selama Januari-Juli, Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) BPBD Sidoarjo telah menangani 116 kebakaran. Sebagian besar menyasar lahan kosong.

Tercatat, ada 46 lahan kosong yang terbakar dalam tujuh

bulan. Lokasinya banyak berada di kawasan permukiman. Selain lahan, kebakaran tahun ini juga terjadi pada sejumlah objek lain, seperti rumah, tempat usaha, industri, hingga kendaraan.

Humas Damkar BPBD Sidoarjo Yoli Wisnu menjelaskan, kondisi lahan yang mulai mengering selama musim kemarau membuat potensi kebakaran semakin besar. Api dari pembakaran mudah merembet ketika terkena hembusan angin. "Penyebabnya karena rum-

put sudah kering dan mudah terbakar," ujarnya.

Yoli mengatakan, pemilik lahan diminta rutin membersihkan rumput dan tanaman kering yang dapat menjadi bahan bakar ketika terjadi kebakaran. Terutama untuk lingkungan perumahan. Sebab kebakaran bisa memicu terjadinya musibah lebih besar.

Kebakaran lahan kosong sempat terjadi Senin (10/8). Kejadian tersebut tersebar di empat kecamatan yakni Sedati, Krian, Porong, dan Waru. (ful/hen)

KEBAKARAN TAHUN 2025-2026

Sebanyak **169** kebakaran terjadi tahun 2025

Lahan kosong **82** kejadian

Ada **116** kasus selama Januari-Juli 2026

Kebakaran menyasar **46** lahan kosong



DAMKAR SIDOARJO

DAMPAK CUACA PANAS: Petugas Damkar Sidoarjo memadamkan api yang membakar lahan kosong di Tambak Sawah, Waru, Senin (10/8).



DINKOPUM

NAIK KELAS: Pelaku usaha difabel mengikuti pelatihan pengelolaan bisnis di Kantor Dinkopum Sidoarjo kemarin (11/8).

60 Pengusaha Difabel Belajar Kelola Bisnis

SIDOARJO – Sebanyak 60 pelaku usaha difabel dari 18 kecamatan dikumpulkan kemarin (11/8). Mereka didorong untuk naik kelas lewat berbagai pelatihan seperti manajemen keuangan, pembuatan kerajinan tangan, dan pengembangan jasa.

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sidoarjo Sulistyowati mengatakan, materi yang diberikan cukup menyentuh kebutuhan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis sehari-hari. "Tadi saya diajari tentang manajemen tata kelola usaha. Yang kedua kami diajarkan strategi untuk meningkatkan UMKM," katanya kemarin (11/8).

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinkopum Sidoarjo Amad Adi Subhan menjelaskan, ada tiga materi utama yang diberikan kepada peserta. Yakni manajemen usaha, tata kelola keuangan, dan strategi pemasaran. "Tiga materi ini penting untuk menjadi pengetahuan bagi mereka supaya usaha yang dibangun semakin berkembang dan naik kelas," ujarnya. (ful/hen)

CS
Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

19 Siswa SD di Sidoarjo Keracunan, DPRD Minta Kantin Sekolah Diawasi Ketat



Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Sebanyak 19 siswa SDI Ar Rahmah, Dusun Lengki, Desa Suruh, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, mengalami dugaan keracunan. DPRD Sidoarjo meminta sekolah memperketat pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi para siswa. Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlari, mengatakan kasus tersebut harus menjadi evaluasi bagi pihak sekolah. Terlebih, pengawasan terhadap makanan yang dijual di lingkungan sekolah berkaitan langsung dengan kesehatan para siswa. Dhamroni juga mendorong sekolah yang belum mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk segera mengajukan diri. Menurutnya, program tersebut dapat menjadi salah satu upaya memastikan siswa memperoleh makanan yang bergizi dan layak konsumsi. Selain program MBG, Dhamroni meminta sekolah meningkatkan pengawasan terhadap kantin. Dia mengingatkan agar makanan dan minuman yang dijual kepada siswa tidak mengandung bahan yang berisiko terhadap kesehatan. “Diharapkan sekolah juga mengawasi kantin agar kantin sekolah menyediakan dan menjual makanan dan minuman yang sehat. Jangan kue, makanan dan minuman yang mengandung pengawet yang tidak baik untuk kesehatan anak,” ujarnya. Politisi PKB itu berharap kejadian dugaan keracunan yang dialami 19 siswa tidak kembali terjadi. Dia meminta sekolah lebih serius mengawasi jajanan siswa dan memastikan makanan serta minuman yang beredar di lingkungan sekolah aman untuk dikonsumsi.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

RAPAT PARIPURNA DPRD SIDOARJO: KETENAGAKERJAAN, PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH, DAN DINAMIKA ALAT KELENGKAPAN DEWAN

SIDOARJO, KABARGRESS.COM — Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (11/8/2026), tidak hanya membahas agenda legislasi daerah. Forum tersebut juga menjadi ruang bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda), sekaligus mengumumkan perubahan susunan alat kelengkapan DPRD masa jabatan 2024-2029. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih dan dihadiri Wakil Ketua DPRD H. Suyarno, Wakil Bupati Hajjah Mimik Idayana, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta 26 anggota DPRD Sidoarjo. Agenda pertama adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Raperda tersebut berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur sekaligus memperkuat penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo. Persoalan ketenagakerjaan memiliki posisi penting bagi Sidoarjo sebagai salah satu daerah dengan aktivitas industri dan dunia usaha yang cukup berkembang. Karena itu, pembahasan regulasi ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut aspek administratif pemerintahan, tetapi juga menyentuh kepentingan pekerja, perusahaan, dan iklim investasi daerah. Pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Raperda. Melalui forum tersebut, setiap fraksi dapat memberikan catatan, masukan, maupun pertanyaan terhadap substansi regulasi sebelum pembahasan berlanjut pada tahapan berikutnya. Agenda berikutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan regulasi mengenai perangkat daerah berkaitan dengan struktur birokrasi pemerintahan. Penyesuaian organisasi perangkat daerah perlu mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik, efektivitas kelembagaan, pembagian kewenangan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. Dalam konteks tersebut, pandangan fraksi menjadi bagian dari fungsi kontrol DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah. Perubahan struktur birokrasi diharapkan tidak berhenti pada perubahan nomenklatur, tetapi memiliki konsekuensi terhadap peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Selain dua agenda legislasi tersebut, rapat paripurna juga mengumumkan perubahan susunan alat kelengkapan DPRD Sidoarjo masa jabatan 2024-2029. Perubahan itu merupakan bagian dari dinamika kelembagaan DPRD dalam menjalankan pembagian tugas dan fungsi antaranggota. Dalam rancangan keputusan yang dibacakan, salah satu perubahan menyangkut pergantian nama anggota dalam susunan alat kelengkapan Dewan. Perubahan tersebut secara administratif menjadi dasar bagi anggota DPRD untuk menjalankan tugas pada alat kelengkapan masing-masing. Namun, secara politik kelembagaan, perubahan komposisi tersebut juga memperlihatkan bahwa konfigurasi internal DPRD dapat mengalami penyesuaian selama masa jabatan berlangsung. Alat kelengkapan DPRD memiliki posisi strategis karena menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Melalui komisi dan badan DPRD, pembahasan berbagai persoalan pemerintahan serta kepentingan masyarakat dilakukan secara lebih spesifik. Karena itu, perubahan komposisi alat kelengkapan dewan perlu dilihat dalam kerangka peningkatan efektivitas kerja lembaga. Anggota yang memperoleh penugasan baru dituntut mampu memahami persoalan di bidang masing-masing dan membawa kepentingan masyarakat dalam setiap pembahasan. Rapat paripurna tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana tiga ranah kerja DPRD berjalan dalam satu forum, yakni pembentukan regulasi, pengawasan terhadap struktur pemerintahan daerah, dan penataan internal kelembagaan DPRD. Setelah seluruh agenda disampaikan, pimpinan rapat menyatakan rangkaian pembahasan telah selesai. Forum kemudian ditutup dengan ucapan hamdalah. Tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai agenda yang telah dibahas tidak berhenti sebagai keputusan administratif, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sidoarjo. (Ery)

